



Kementerian Pertanian

**LAPORAN KEUANGAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN MALUKU UTARA**

TAHUN ANGGARAN 2023



BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
Jalan Raya Kusu No.1 Sofifi Maluku Utara

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
TAHUN ANGGARAN 2022**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023

Jalan Raya Kusu No.1

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sofifi, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



[Handwritten Signature]
Dr. Abdul Syukur Syarif, SP.MP
NIP. 197805122008011011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Singkatan	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I Laporan Realisasi Anggaran	3
II Neraca	4
III Laporan Operasional	5
IV Laporan Perubahan Ekuitas	6
V Catatan atas Laporan Keuangan	7
A Penjelasan Umum	7
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	15
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
B.2 Belanja	17
B.3 Belanja pegawai	17
B.4 Belanja Barang	18
B.5 Belanja modal	20
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
C.1 Aset Lancar	22
C.1.1 Persediaan	22
C.2 Aset Tetap	22
C.2.1 Tanah	22
C.2.2 Peralatan dan Mesin	23
C.2.3 Gedung dan Bangunan	23
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	24
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	24
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24
C.4 Aset Lainnya	25
C.4.1 Aset Tak Berwujud	25
C.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	25
C.5 Kewajiban Jangka Pendek	26
C.6 Ekuitas	26
D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	27
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	27
D.2 Beban Pegawai	27
D.3 Beban Persediaan	28
D.4 Beban Barang dan Jasa	28
D.5 Beban Pemeliharaan	29
D.6 Beban Perjalanan Dinas	31
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	31

DAFTAR ISI

D.8	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
E.1	Ekuitas Awal	32
E.2	Surplus/Defisit-LO	32
E.3	Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	32
E.3.1	Koreksi Nilai Aset Tetap/lainnya non Revaluasi	32
E.4.	Transaksi antar entitas	33
E.4.1	Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	
E.5	Ekuitas Akhir	33
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	34
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	34
F.2	Pengungkapan Lain-lain	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sofifi, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



[Handwritten Signature]
Dr. Abdul Syukur Syarif., SP. MP
NIP. 197805122008011011

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Laporan Realisasi Anggaran	3
Tabel 2	: Neraca	4
Tabel 3	: Laporan Operasional	5
Tabel 4	: Laporan Perubahan Ekuitas	6
Tabel 5	: Penjelasan Pos pos anggaran	15
Tabel 6	: Estimasi dan Realisasi pendapatan	16
Tabel 7	: Perbandingan Realisasi Pendapatan	16
Tabel 8	: Rincian Pagu dan Realisasi	17
Tabel 9	: Perbandingan Realisasi Belanja	17
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja pegawai	18
Tabel 11	: Perbandingan Belanja barang	18
Tabel 12	: Belanja dalam rangka PEN	19
Tabel 13	: Belanja pengembangan Benih	19
Tabel 14	: Perbandingan Belanja Modal	20
Tabel 16	: Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21
Tabel 17	: Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21
Tabel 18	: Perbandingan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	22
Tabel 19	: Perbandingan Persediaan	23
Tabel 20	: Rekapitulasi Aset Tanah	23
Tabel 21	: Mutasi Peralatan dan Mesin	24
Tabel 22	: Mutasi Gedung dan Bangunan	24
Tabel 23	: Mutasi Jalan dan Jaringan	25
Tabel 24	: Akumulasi Penyusutan	25
Tabel 25	: Aset Lain lain	26
Tabel 26	: Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	26
Tabel 27	: Akumulasi Aset Lainnya	27
Tabel 28	: Perbandingan PNB	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	LRA
Lampiran 2	:	Neraca
Lampiran 3	:	Laporan Operasional
Lampiran 4	:	Laporan PE
Lampiran 5	:	BAR Rekon dengan KPPN
Lampiran 6	:	BAR Rekon Internal
Lampiran 7	:	LPJ
Lampiran 8	:	Laporan PNBP
Lampiran 9	:	DIPA Dan RKAKL

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp66,368,525,00 atau mencapai 111,25% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp59,658,000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.357.431.260,00 atau mencapai 95,31% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.620.919.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp101.781.267.876,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp206.887.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp101.574.380.376,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp101.781.267.876,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp45.197.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp6.711.848.933,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-6.666.651.933,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp456.209.025,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-6.210.442.908,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp102.700.648.049,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-6.210.442.908,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp5.291.062.735,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp101.781.267.876,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023			31 Desember 2022
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	59.658.000,00	66.368.525,00	112,31	61.098.270,00
Jumlah Pendapatan		59.658.000,00	66.368.525,00	112,31	61.098.270,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2.092.297.000,00	2.045.276.968,00	97,75	2.652.509.242,00
Belanja Barang	B.4.	3.528.622.000,00	3.312.154.292,00	93,87	5.068.386.594,00
Belanja Modal	B.5.	0,00	0,00	0,00	1.107.155.240,00
Jumlah Belanja		5.620.919.000,00	5.357.431.260,00	95,31	5.447.452.660,00

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran

II. NERACA

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.	206.887.500,00	91.800.000,00
Jumlah Aset Lancar		206.887.500,00	91.800.000,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	84.233.963.671,00	84.233.963.671,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.319.077.281,00	7.298.122.281,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	15.421.540.367,00	15.421.540.367,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	7.131.629.882,00	7.131.629.882,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	59.800.000,00	59.800.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	00	00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-12.591.630.825,00	-11.536.208.152,00
Jumlah Aset Tetap		101.574.380.376,00	102.608.848.049,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	00	00
Aset Lain-lain	C.4.2.	151.657.257,00	172.612.257,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-151.657.257,00	-172.612.257,00
Jumlah Aset Lainnya		00	00
Jumlah Aset		101.781.267.876,00	102.700.648.049,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	101.781.267.876,00	102.700.648.049,00
Jumlah Ekuitas		101.781.267.876,00	102.700.648.049,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		101.781.267.876,00	102.700.648.049,00

Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	45.197.000,00	55.680.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		45.197.000,00	55.680.000,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.045.276.968,00	2.494.689.056,00
Beban Persediaan	D.3.	322.577.000,00	346.999.000,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.390.491.567,00	1.800.313.261,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	296.432.099,00	266.819.665,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	622.603.626,00	417.881.688,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	00	00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8.	00	00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9.	1.034.467.673	1.118.030.00
JUMLAH BEBAN		6.711.848.933,00	6.444.732.698,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-6.666.651.933,00	-6.389.052.698,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	456.209.025,00	198.300.014,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	00	00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		456.209.025,00	250.800.014,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-6.210.442.908,00	-6.135.273.050,00

Tabel 3. Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan 31 DESEMBER 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1.	102.700.648.04900	103.447.128.087,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-6.210.442.908,00	-6.135.273.050,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	00	00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	00	00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	5.291.062.735,00	5.386.354.390,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	(919.380.173,00)	(746.918.660,00)
EKUITAS AKHIR	E.6.	101.781.267.876,00	102.698.209.427,00

Tabel 4. LPE per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi”

A. Visi/Misi

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara (BPSIP) Maluku Utara berkomitmen dengan Visi “ BPSIP merupakan bagian Integral dari Visi Badan Standar Instrumen Pertanian Berkelas Dunia, sedangkan Misi BPSIP Maluku Utara adalah : Pada tahun 2023 Menjadi Lembaga Pertanian yang menghasilkan dan mendiseminasikan Standar Instrumen Pertanian Spesifik lokasi untuk mewujudkan Pertanian Bioindustri di wilayah Kepulauan Maluku Utara.

B. Fungsi

pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi

pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi

pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap**
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian	43.345.000,00	43.345.000,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	16.313.000,00	16.313.000,00
Jumlah Pendapatan	59,658,000,00	59,658,000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.159.081.000,00	2.062.969.000,00
Belanja Lembur	29.328.000,00	29.328.000,00
Belanja Barang Operasional	987.548.000,00	987.548.000,00
Belanja Barang Non Operasional	235.158.000,00	1.236.856.000,00
Belanja Barang Persediaan	63.292.000,00	2.630.000,00
Belanja Jasa	196.800.000,00	276.420.000,00
Belanja Pemeliharaan	299.652.000,00	300.537.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	271.728.000,00	724.336.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	0,00
Belanja Penambah Nilai Gedung & Bangunan	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	00	00
Jumlah Belanja	4.242.587.000,00	5.620.919.000,00

Tabel 5. Penjelasan Pos Pos Anggaran

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.368.525,00 atau mencapai 111.25% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp59.658.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian	43.345.000,00	24.953.000,00	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	16.313.000,00	20.244.000,00	
Penerimaan Kembali Belnja Gaji		21.171.525,00	
Jumlah	59,658,000,00	66,368,525,00	

Tabel 6. Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 10% dibandingkan TA 2022. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian	24.953.000,00	19,422,000,00	-0,49
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.244.000,00	5.418.256,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belnja Gaji	21.171.525,00	36,258,000,00	44,96
Jumlah	66.368.525,00	61.098.270,00	12,59

Tabel 7. Perbandingan realisasi Pendapatan

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp5.357.431.260,00 atau 95,31% dari anggaran belanja sebesar Rp5.620.919.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2.092.297.000,00	2.045.276.968,00	97,75
Belanja Barang	3.528.622.000,00	3.312.154.292,00	93,87
Belanja Modal			
Total Belanja Kotor	5.620.919.000,00	5.357.431.260,00	95,31
Total Belanja	5.620.919.000,00	5.357.431.260,00	95,31

Tabel 8. Pagu dan Realisasi belanja

Dibandingkan dengan Tahun 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 2,2% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya Anggaran belanja barang yang diblokir dan tidak dapat direalisasikan pada tahun 2023

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	.%
Belanja Pegawai	2.045.276.968,00	2.494.689.056,00	
Belanja Barang	3.312.154.292,00	2.670.763.604,00	
Belanja Modal		282.000.000,00	
Total Belanja	5.357.431.260,00	5.447.452.660,00	

Tabel 9. Perbandingan realisasi belanja

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.045.276.968,00 dan Rp2.494.689.056,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2023 mengalami Penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penurunan pagu belanja pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.026.349.773,00	2.460.724.335,00
Belanja Lembur	29.244.000,00	34.345.000,00
Jumlah Belanja Kotor	2.055.593.773,00	2.495.069.335,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-10.316.805,00	-380.279,00
Jumlah Belanja	2.045.276.968,00	2.494.689.056,00

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.313.154.292,00 dan Rp2.670.763.604,00. Realisasi belanja barang TA 2023 mengalami Kenaikan dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kenaikan pagu dan realisasi belanja barang pada tahun 2023

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023`	Realisasi 31 Desember 2022`
Belanja Barang Operasional	983.706.812,00	954.506.133,00
Belanja Barang Non Operasional	1.171.100.022,00	638.125.250,00
Belanja Barang Persediaan	2.627.000,00	185.749.000,00
Belanja Jasa	235.684.733,00	207.681.868,00
Belanja Pemeliharaan	296.432.099,00	266.819.665,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	622.603.626,00	417.881.688,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	00	00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	00	00
Jumlah Belanja Kotor	3.312.154.292,00	2.670.763.604,00
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.312.154.292,00	2.670.763.604,00

Tabel 11. Perbandingan belanja barang

B.4.1. Belanja Barang yang diserahkan kepada Masyarakat

Pada Tahun 2023 Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tidak Menerima Pagu belanja yang diserahkan kepada Masyarakat

Rekapitulasi belanja 526 (yang diserahkan kepada Masyarakat) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

No	Uraian Jenis Bantuan	Lokasi			Volume	Nilai Kontrak
		Desa	Kecamatan	Kabupaten		
a	Barang				0	
					0	
					0	
	Subtotal bantuan barang					
b	Uang				0	
					0	
					0	
	Subtotal bantuan uang					
	Total Bantuan 526					0

Tabel 12. Rekapitulasi belanja 526

B.4.2. Belanja Barang dalam rangka PEN

Pada Tahun 2023 Satker Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tidak Menerima Pagu belanja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional

Rekapitulasi belanja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

No.	Akun	Uraian Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Uraian Kegiatan
1	521241		0	0	0	
2	521841		0	0	0	
3	522192		0	0	0	
4	524115		0	0	0	
JUMLAH			0	0	0	

Tabel 13.Rekapitulasi Belanja dalam rangka PEN

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp282.000.000,00 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA (2023 Tidak menerima anggaran untuk belanja modal

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	84.000.000,00
Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	198.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	00	00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	282.000.000,00
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	282.000.000,00

Tabel 14. Perbandingan Belanja Modal

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp84.000.000,00. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	84.000.000,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	84.000.000,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	84.000.000,00

Tabel 15. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp198.000.000,00.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	198.000.000,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	198.000.000,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	198.000.000,00

Tabel 16. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak Terdapat Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	00	0,00	0,00

Tabel 17. Perbandingan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp187.350.000.000,00 dan Rp91.800.000.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan Lainnya	206.887.500,00	91.800.000,00
Jumlah	206.887.500,00	91.800.000,00

Tabel 20. Perbandingan Persediaan

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp84.233.963.671,00 dan Rp84.233.963.671,00.

Dibawah ini Tabel Rekapitulasi Aset Tanah sampai dengan 31 Desember 2023

No	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Lokasi
1	2.01.02.06.003.1	1	2.790.000	80.413.587.671	80.413.587.671	IP2TP, Bacan
2	2.01.01.04.001.1	1	31.259	159.378.000	3.008.679.000	BPSIP, Kusu
3	2.01.01.04.001.1	2	1223	25.000.000	134.530.000	BPSIP, Kusu
4	2.01.01.04.001.1	3	705	7.300.000	82.397.000	BPSIP, Kusu
5	2.01.03.07.009.1	1	2.821	60.000.000	310.310.000	BPSIP, Kusu
6	2.01.03.07.009.2	2	2.586	55.000.000	28.4460.000	BPSIP, Kusu
Total				80.720.265.671	84.233.963.671	

Tabel 21. Rekapitulasi Aset Tanah sampai 31 Desember 2023

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.319.077.281,00 dan Rp7.298.122.281,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.298.122.281,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	0,00
Mutasi Kurang	
Beban Penyusutan	(190.726.878,00)
Saldo per 31 Desember 2023	7.319.077.281,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-7.000.120.021,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	318.957.260,00

Tabel 22. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.421.540.367,00 dan Rp15.421.540.367,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.421.540.367,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	00
Saldo per 31 Desember 2022	
Saldo per 31 Desember 2022	15.421.540.367,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-2.040.943.820,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	13.380.596.547,00

Tabel 23. Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan

C.2.4. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Pada tahun 2023 tidak terdapat Konstruksi dalam pengerjaan

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kontruksi dalam pengerjaan	00	00
Jumlah	00	00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.131.629.882,00 dan Rp7.131.629.882,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	7.131.629.882,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	00
Saldo per 31 Desember 2023	7.131.629.882,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	-3.550.566.984,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	3.581.062.898,00

Tabel 24. Mutasi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan

Tidak Terdapat Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.800.000,00 dan Rp59.800.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-12.591.630.825,00 dan Rp-11.536.208.152,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.319.077.281,00	-7.000.120.021,00	318.957.260,00
2.	Gedung dan Bangunan	15.421.540.367,00	-2.040.943.820,00	13.380.596.547,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.131.629.882,00	-3.550.566.984,00	3.581.062.898,00
4.	Aset Tetap Lainnya	59.800.000,00	0,00	59.800.000,00
Akumulasi Penyusutan		29.932.047.530,00	-12.591.630.825,00	17.340.416.705,00

Tabel 25. Rincian Akumulasi Penyusutan

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00. *Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.*

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	00
Jumlah	00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp151.657.257,00 dan Rp172.742.257,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	172.612.257,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	20.955.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	151.657.257,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	-151.657.257,00
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp-151.657.257,00 dan Rp- Rp-172.612.257,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Tak Berwujud	6.115.000,00	-6.115.000,00	00
2.	Aset Lain-lain	172.612.257,00	-172.612.257,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		172.612.257,00	-172.612.257,00	00

Tabel 28.Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainna

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp101.781.267.876,00 dan Rp102.698.209.427,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp50.316.700,00 dan Rp50.316.700,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan	24.953.000,00	36.258.000,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	00	00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20.244.000,00	19.422.000,00
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	21.171.525,00	5.418.256,00
Jumlah	66.368.525,00	61.098.270,00

Tabel 29. Perbandingan PNBPN Lainnya

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.045.276.968,00 dan Rp2.494.689.056,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Gaji Pokok PNS	1.398.977.440,00	1.692.603.200,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	22.772,00	29.601,00
Beban Tunj. Anak PNS	19.053.996,00	26.703.296,00
Beban Tunj. Beras PNS	70.537.080,00	87.410.940,00
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	1.200.000,00	1.200.000,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	138.440.000,00	233.720.000,00
Beban Tunj. PPh PNS	3.801.950,00	5.223.293,00
Beban Tunj. Struktural PNS	21.960.000,00	20.880.000,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87.002.030,00	98.273.726,00
Beban Tunjangan Umum PNS	36.725.000,00	44.320.000,00
Beban Uang Lembur	34.345.000,00	34.345.000,00
Beban Uang Makan PNS	240.264.000,00	249.980.000,00
Jumlah	2.045.276.968,00	2.494.689.056,00

Tabel 30. Perbandingan Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp322.577.000,00 dan Rp292.584.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Persediaan bahan baku	51.000.000,00	102.800.000,00
Beban Persediaan konsumsi	2.627.000,00	81.419.000,00
Beban persediaan lainnya	268.950.000,00	162.780.000,00
Jumlah	322.577.000,00	292.584.000,00

Tabel 31. Perbandingan Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.390.491.567,00 dan Rp1.800.313.251,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Bahan	1.061.249.216,00	278.055.250,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	00	00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	103.550.000,00	342.370.000,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	32.473.000,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	96.298.000	113.664.000,00
Beban Honor Output Kegiatan	6.300.000,00	17.700.000,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	824.000,00
Beban Jasa Lainnya	3.975.855,00	3.086.000,00
Beban Jasa Profesi	15.188.000,00	5.942.106,00
Beban Keperluan Perkantoran	835.143.812,00	808.369.133,00
Beban Langganan Listrik	190.720.878,00	191.891.657,00
Beban Langganan Telepon	4.800.000,00	5.938.105,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	00	00
Beban Sewa	0,00	0,00
Jumlah	2.390.491.567,00	1.800.313.251,00

Tabel 32. Perbandingan Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp296.432.099,00 dan Rp266.819.665,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	92.699.000,00	89.630.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	203.733.099,00	177.189.665,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	,00	,00
Jumlah	296.432.099,00	266.819.655,00

Tabel 33. Perbandingan Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp622.603.626,00 dan Rp417.881.688,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Perjalanan Biasa	612.603.626,00	417.881.688,00
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	00	00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	00
Jumlah	622.603.626,00	417.881.688,00

Tabel 34. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	00	0,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	00	0,00
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	00	0,00
Jumlah	00	0,00

Tabel 35. Perbandingan Beban Barnag untuk diserahkan kepada Masyarakat

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp530.786.369,00 dan Rp561.697.371,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	336.973.464,00	166.072.094,00
Beban Penyusutan Irigasi	75.522.737,00	29.699.612,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	371.845.367,00	185.922.682,00
Beban Penyusutan Jaringan	75.522.737,00	37.761.367,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	190.726.878,00	142.241.616,00
Jumlah	1.050.591.183,00	561.697.371,00

Tabel 36. Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pada tahun 2023 terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional berupa Beban persediaan lainnya hal ini merupakan hasil dari kegiatan Produksi benih pala yang menghasilkan anakan pala sebanyak 12.162 dengan nilai Rp.456.209.025 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	,00	,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	435.037.500,00	250.800.014,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.171.525,00	5.418.256,00
Jumlah	456.209.025,00	256.218.270,00

Tabel 37. Perbandingan Surplus Defisit

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp102.700.648.049,00 dan Rp102.698.209.427,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp-6.210.442.908,00 dan Rp-6.135.273.050,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp,00.

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Gedung dan Bangunan	00
Jumlah	00

Tabel 38. Rincian Koreksi Aset

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.291.062.735,00 dan Rp5.386.354.390,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.357.431.260,00
Diterima dari Entitas Lain	-66.388.525,00
Jumlah	5.291.062.735,00

Tabel 39. Rincian Transaksi Antar Entitas

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 saldo DDEL adalah sebesar Rp-66.388.525,00 sedangkan DKEL sebesar Rp5.357.431.260,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp101.781.267.876,00 dan Rp102.698.209.427,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Realisasi PNPB sesuai LRA sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 66.368.525 sedangkan pada LO Pendapatan sebesar 45.197.000,- terdapat selisih Rp.21.171.525, perbedaan ini pada LRA mencatat pendapatan termasuk penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu
- Pendapatan Perolehan aset lainnya sebesar Rp.435.037.500 merupakan total dari perolehan lainnya dari tanaman yang akan diserahkan ke masyarakat, berupa benih Diseminasi senilai Rp.206.887.500,- Sisanya senilai Rp.228.150.000 merupakan transaksi perolehan lainnya